

# Konsep Kepemimpinan Pendidikan Menurut Ibn Khaldun: Relevansi Bagi Pengembangan Manajemen Lembaga Pendidikan Islam

**Sapri<sup>1</sup>, Tamimi Mujahid<sup>2</sup>, Rizqi Almajid<sup>3</sup>, Muliana Putri<sup>4</sup>, Adinda Rahmah Rangkuti<sup>5</sup>, Irfan<sup>6</sup>, Abdi Syahputra<sup>7</sup>**

1,2,3,4,5,6,7 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

---

## ABSTRACT

This study aims to analyze the concept of educational leadership according to Ibn Khaldun and explore its relevance to the development of contemporary Islamic educational institution management. This study uses a qualitative method with a library research approach, through a review of Ibn Khaldun's *al-Muqaddimah* and the latest scientific literature from 2019–2025 related to Islamic education management, transformative leadership, and spiritual values in education. The results show that Ibn Khaldun places leadership as a major factor in the formation of civilization ('umran) and emphasizes that education is the main means of shaping civilized human beings. This study concludes that the application of Ibn Khaldun's leadership values can strengthen Islamic education management towards an adaptive, ethical, and sustainable system. The practical implication is that Islamic educational institutions need to develop a value-based management system and a collaborative organizational culture to face the challenges of the digital era without losing their spiritual identity.

*Islamic Education Leadership, Ibn Khaldun, Education Management, Islamic Values, Digital Era*

## Kata Kunci

## Corresponding Author:

*Islamic Education Leadership, Ibn Khaldun, Education Management, Islamic Values, Digital Era*

## PENDAHULUAN

Pemikiran kepemimpinan pendidikan dalam Islam memiliki akar yang kuat dalam khazanah intelektual klasik, salah satunya melalui gagasan Ibn Khaldun. Sebagai seorang pemikir besar Islam, Ibn Khaldun tidak hanya dikenal dalam bidang sejarah dan sosiologi, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam pemikiran pendidikan dan kepemimpinan. Dalam karyanya *Muqaddimah*, Ibn Khaldun menegaskan bahwa pendidikan merupakan sarana utama pembentukan peradaban ('umran), yang menuntut adanya kepemimpinan yang berwawasan keilmuan dan bermoral. Pendidikan menurut Ibn Khaldun tidak dapat dilepaskan dari peran pemimpin yang mampu

mengarahkan proses pembelajaran secara bertahap, sistematis, dan sesuai dengan perkembangan peserta didik. Oleh karena itu, konsep kepemimpinan pendidikan menurut Ibn Khaldun menjadi relevan untuk dikaji secara mendalam dalam konteks pengembangan manajemen lembaga pendidikan Islam masa kini (Ibnu Khaldun, 2011).

Ibn Khaldun memandang kepemimpinan sebagai faktor kunci dalam keberhasilan suatu sistem pendidikan. Dalam perspektifnya, pemimpin pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai administrator, tetapi juga sebagai figur teladan yang memiliki integritas moral dan penguasaan ilmu pengetahuan. Kepemimpinan pendidikan harus dibangun atas dasar keadilan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab sosial agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Ibn Khaldun juga mengkritik metode pendidikan yang bersifat otoriter dan menekankan pentingnya pendekatan pedagogis yang humanis. Konsep ini menunjukkan bahwa kepemimpinan pendidikan menurut Ibn Khaldun bersifat visioner dan berorientasi pada pengembangan potensi manusia secara menyeluruh (Ibnu Khaldun, 2011).

Dalam konteks manajemen lembaga pendidikan Islam, pemikiran Ibn Khaldun memiliki relevansi yang sangat kuat. Ia menegaskan bahwa pengelolaan pendidikan harus mempertimbangkan aspek psikologis peserta didik, struktur organisasi lembaga, serta kualitas pendidik sebagai pemimpin pembelajaran. Manajemen pendidikan yang baik menurut Ibn Khaldun adalah manajemen yang mampu mengintegrasikan tujuan akademik dengan pembinaan akhlak. Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan Islam yang menekankan keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan demikian, kepemimpinan pendidikan tidak hanya diukur dari efektivitas administrasi, tetapi juga dari keberhasilan dalam membentuk karakter peserta didik (Indra Kurniawan, Vol. 7, No. 2, 2022)

Relevansi pemikiran Ibn Khaldun semakin terasa di tengah tantangan modernisasi lembaga pendidikan Islam. Globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial menuntut adanya model kepemimpinan pendidikan yang adaptif namun tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Konsep kepemimpinan Ibn Khaldun yang menekankan pada ilmu, moralitas, dan pengalaman praktis dapat menjadi rujukan strategis dalam pengembangan manajemen lembaga pendidikan Islam. Pemimpin lembaga pendidikan Islam dituntut untuk mampu membaca realitas sosial dan merumuskan kebijakan yang responsif tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Dalam hal ini, gagasan Ibn Khaldun menawarkan kerangka konseptual yang relevan dan aplikatif (Muh. Sya'rani, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian tentang konsep kepemimpinan pendidikan menurut Ibn Khaldun menjadi penting untuk dikembangkan dalam studi manajemen pendidikan Islam. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan kepemimpinan dan manajemen lembaga pendidikan Islam yang berorientasi pada nilai, efektivitas, dan keberlanjutan. Dengan mengkaji pemikiran Ibn Khaldun secara mendalam, lembaga pendidikan Islam dapat menemukan model kepemimpinan yang tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga kontekstual dalam menjawab tantangan pendidikan Islam di era modern (Abuddin Nata, 2018).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, artikel, prosiding dan sumber lainnya. Metode penelitian literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur, membaca, memahami, dan menganalisis data yang ada, kemudian merumuskan kesimpulan atau temuan dari hasil analisis tersebut. Metode ini sangat berguna untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik tertentu dan memberikan landasan teoretis yang kuat bagi penelitian (Fransisca, 2023). Fokus utama dari metode ini adalah menganalisis lebih dalam terkait evaluasi sistem pengelolaan sarana dan prasarana sekolah berbasis manajemen mutu melalui transformasi digital (Zulfa dan Halimatuzzahrah, 2025)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Kepemimpinan Pendidikan dalam Perspektif Ibn Khaldun

Pemikiran Ibn Khaldun (1332-1406 M) menjadi salah satu tonggak intelektual penting dalam sejarah peradaban Islam, terutama dalam bidang sosial, pendidikan, dan kepemimpinan. Melalui karya monumentalnya, *al-Muqaddimah*, ia tidak hanya menguraikan teori sosial dan sejarah, tetapi juga memberikan pandangan mendalam tentang hakikat pendidikan dan kepemimpinan. Bagi Ibn Khaldun, pendidikan (*ta'lim*) merupakan sarana pembentukan manusia berperadaban (*insān al-madani*), sedangkan kepemimpinan (*imāmah atau al-qiyādah*) merupakan instrumen penting dalam menjaga keseimbangan dan kemajuan masyarakat (Ibnu Khaldun, 2011).

Kepemimpinan dalam pandangan Ibn Khaldun bukanlah sekadar kedudukan administratif, tetapi amanah moral dan tanggung jawab sosial.

Seorang pemimpin, khususnya dalam bidang pendidikan, harus memiliki tiga dimensi utama: keilmuan ('ilm), moralitas (khuluq), dan tanggung jawab sosial (mas'ūliyyah). Pemimpin yang ideal adalah mereka yang memahami hakikat manusia dan mampu menuntun masyarakat menuju kesejahteraan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kepemimpinan pendidikan bukan hanya mengelola lembaga, tetapi membimbing manusia untuk mencapai kesempurnaan akhlak dan pengetahuan (Abuddin Nata, 2018).

Ibn Khaldun menolak pandangan mekanistik tentang pendidikan yang hanya menekankan aspek kognitif. Ia menegaskan pentingnya pembinaan karakter dan nilai moral sebagai inti pendidikan. Dalam konteks ini, kepemimpinan pendidikan berperan sentral dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menanamkan etika keilmuan, serta menumbuhkan budaya belajar yang beradab. Pemimpin pendidikan, bagi Ibn Khaldun, adalah figur yang berperan sebagai *murabbi* pendidik yang membimbing dengan kasih sayang, hikmah, dan keteladanan.

Pemikiran Ibn Khaldun (1332-1406 M) memberikan kontribusi monumental dalam memahami hakikat pendidikan dan kepemimpinan dalam Islam. Melalui *al-Muqaddimah*, ia menyusun teori sosial, politik, dan pendidikan yang menyatu dalam satu kerangka konseptual: pembangunan peradaban ('umran). Dalam kerangka tersebut, pendidikan berfungsi sebagai sarana pembentukan manusia beradab (*insān al-madani*), sedangkan kepemimpinan (*imāmah* atau *al-qiyādah*) merupakan mekanisme penggerak utama untuk menjaga keberlangsungan dan kemajuan masyarakat (Ibnu Khaldun, 2011).

Ibn Khaldun memandang bahwa kepemimpinan dalam pendidikan tidak hanya memiliki dimensi administratif, melainkan juga dimensi moral, intelektual, dan spiritual. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pemimpin yang berilmu, berakhlak, dan berwawasan luas. Menurutnya, pemimpin adalah cerminan moral masyarakatnya: ketika pemimpin berilmu dan berakhlak, maka masyarakat akan maju; sebaliknya, ketika pemimpin korup dan tidak adil, maka kehancuran peradaban menjadi keniscayaan (Abuddin Nata, 2018).

Dalam konteks pendidikan, Ibn Khaldun menyatakan bahwa pemimpin harus menjadi *murabbi* (pendidik) sebelum menjadi administrator. Ia berpendapat bahwa seorang pemimpin pendidikan tidak hanya bertugas mengelola sistem, tetapi juga membimbing manusia menuju kesempurnaan akhlak dan ilmu pengetahuan. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran educational leadership modern yang memandang kepemimpinan sebagai proses transformasi nilai dan budaya organisasi (Rahman & Fauzi, 2021).

Lebih jauh, Ibn Khaldun memperkenalkan konsep 'asabiyyah sebagai dasar kekuatan sosial dan institusional. Dalam konteks kepemimpinan pendidikan, 'asabiyyah dapat diartikan sebagai semangat kolektif dan solidaritas akademik di antara warga sekolah atau lembaga pendidikan. Pemimpin pendidikan yang efektif adalah mereka yang mampu membangun 'asabiyyah *ilmiyah* semangat kebersamaan dalam menuntut ilmu dan mengembangkan peradaban. Prinsip ini memiliki kesesuaian dengan teori *collaborative leadership* yang menekankan pentingnya partisipasi semua anggota lembaga dalam proses pengambilan keputusan (Zulkifli, Hasan, & Alawi, 2024).

Ibn Khaldun juga menolak bentuk kepemimpinan yang bersifat otoriter. Ia menyatakan bahwa kekuasaan yang dijalankan tanpa ilmu dan kebijaksanaan hanya akan menimbulkan ketakutan, bukan ketaatan. Dalam dunia pendidikan, hal ini dapat diartikan sebagai penolakan terhadap sistem manajemen yang hierarkis dan tertutup. Pemimpin yang baik menurut Ibn Khaldun adalah yang mampu menjadi teladan, mendengarkan aspirasi, dan menciptakan lingkungan belajar yang menumbuhkan rasa tanggung jawab. Gagasan ini selaras dengan nilai-nilai kepemimpinan profetik dalam Islam, yang meneladani sifat Nabi Muhammad SAW: *ṣidq* (jujur), *amānah* (dapat dipercaya), *tablīgh* (komunikatif), dan *fatānah* (cerdas).

Konsep kepemimpinan Ibn Khaldun juga dapat dilihat sebagai refleksi dari nilai-nilai tauhid yang integral. Ia menempatkan Allah sebagai sumber segala pengetahuan dan otoritas tertinggi. Oleh karena itu, setiap pemimpin pendidikan harus memiliki kesadaran tauhidik bahwa segala kebijakan dan tindakan yang diambil merupakan bagian dari tanggung jawab di hadapan Allah. Pemimpin yang memiliki kesadaran spiritual semacam ini tidak akan menyalahgunakan kekuasaan dan akan menjadikan lembaga pendidikan sebagai wadah dakwah serta pengabdian sosial (Nurhadi, 2023).

Dari uraian tersebut, tampak bahwa konsep kepemimpinan Ibn Khaldun menuntut keseimbangan antara tiga aspek utama: keilmuan ('ilm), moralitas (*khuluq*), dan tanggung jawab sosial (*mas'ūliyyah*). Ketiga aspek ini harus menyatu dalam diri seorang pemimpin agar lembaga pendidikan mampu melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan berperadaban. Dengan demikian, pemikiran Ibn Khaldun tidak hanya menjadi warisan klasik, tetapi juga panduan konseptual bagi pengembangan manajemen pendidikan Islam modern yang berorientasi pada nilai.

### **Prinsip-Prinsip Kepemimpinan dan Pendidikan dalam Islam**

Islam memandang kepemimpinan sebagai amanah besar yang harus dijalankan dengan keadilan, tanggung jawab, dan keikhlasan. Prinsip dasar

kepemimpinan dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, seperti firman Allah:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." (QS. An-Nisā' [4]: 58)

Ayat ini menegaskan bahwa inti kepemimpinan adalah amanah dan 'adl (keadilan). Dalam konteks pendidikan, amanah berarti tanggung jawab untuk mencerdaskan dan membina manusia agar berakhhlak mulia, sedangkan keadilan berarti memberikan kesempatan belajar yang sama bagi setiap individu.

Dalam literatur manajemen pendidikan Islam, terdapat beberapa prinsip utama kepemimpinan, yaitu: (1) syura (musyawarah), yang menekankan pengambilan keputusan kolektif; (2) amanah (tanggung jawab moral); (3) 'adl (keadilan dalam kebijakan dan evaluasi); dan (4) ihsan (profesionalisme dan integritas kerja) (Rahim & Mahmud, 2021). Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan ajaran Ibn Khaldun yang menolak kepemimpinan otoriter dan menekankan keharusan pemimpin untuk bersikap adil serta mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, pendidikan Islam harus dijalankan secara bertahap (*tadarruj*) sesuai perkembangan intelektual peserta didik. Ibn Khaldun mengkritik keras metode pengajaran yang terlalu kaku dan menindas karena dapat menghambat potensi manusia. Ia berpendapat bahwa setiap individu memiliki kemampuan berbeda yang harus dikembangkan secara gradual dan berkesinambungan. Prinsip ini selaras dengan paradigma student-centered learning dalam pendidikan modern (Indra Kurniawan, 2022).

Selain amanah dan keadilan, Islam juga menekankan pentingnya *syura* (musyawarah) dalam kepemimpinan. Prinsip ini ditegaskan dalam QS. Asy-Syura [42]: 38, yang memuji orang-orang yang "urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka." Dalam manajemen pendidikan, prinsip syura dapat diterapkan melalui pengambilan keputusan partisipatif, di mana semua pemangku kepentingan dilibatkan dalam menentukan arah kebijakan lembaga. Penelitian oleh Al-Saidi (2023) menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam yang menerapkan sistem syura cenderung memiliki tingkat kepuasan dan komitmen kerja lebih tinggi di antara staf dan guru.

Selain itu, Islam menekankan prinsip *ihsan* (profesionalisme dan keunggulan) dalam setiap aspek pekerjaan, termasuk kepemimpinan pendidikan. Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan

sempurna" (HR. al-Baihaqi). Dalam konteks pendidikan, ihsan berarti bahwa pemimpin harus mengelola lembaga dengan standar profesionalisme tinggi, memastikan mutu pembelajaran, dan berkomitmen terhadap peningkatan kualitas berkelanjutan (*continuous improvement*). Prinsip ini menjadi dasar bagi penerapan *Total Quality Management* (TQM) dalam lembaga pendidikan Islam modern (Zulfa & Halimatuzzahrah, 2025).

Prinsip penting lainnya adalah *ta'dil* (penyeimbangan). Pemimpin pendidikan Islam harus mampu menyeimbangkan antara aspek spiritual dan rasional, antara manajemen duniawi dan orientasi ukhrawi. Ibn Khaldun menekankan bahwa pendidikan harus berfungsi membentuk manusia yang seimbang secara intelektual, moral, dan emosional. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pembinaan akhlak dan penguatan karakter. Pandangan ini sejalan dengan gagasan pendidikan karakter kontemporer yang mengedepankan integrasi antara moral dan kompetensi (Indra Kurniawan, 2022).

Lebih lanjut, Islam menekankan pentingnya teladan (*uswah hasanah*) dalam kepemimpinan. Rasulullah SAW menjadi contoh terbaik kepemimpinan pendidikan karena beliau memimpin dengan kasih sayang, keadilan, dan kebijaksanaan. Ibn Khaldun menegaskan bahwa pemimpin yang baik bukan hanya memerintah, tetapi membimbing dengan hikmah dan keteladanan. Pemimpin pendidikan Islam yang meneladani akhlak Nabi akan mampu menumbuhkan kepercayaan, loyalitas, dan semangat kerja kolektif di lingkungan lembaganya (Nurhadi, 2023).

Dalam praktiknya, prinsip-prinsip kepemimpinan Islam tersebut membentuk dasar dari sistem manajemen pendidikan Islam yang berorientasi pada nilai. Sebuah lembaga pendidikan Islam yang dikelola berdasarkan prinsip *amanah*, *'adl*, *syura*, *ihsan*, dan *uswah* akan mampu menumbuhkan lingkungan belajar yang kondusif, inklusif, dan berkarakter. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi landasan bagi pengembangan teori kepemimpinan Ibn Khaldun yang akan dibahas lebih dalam pada bagian berikutnya mengenai relevansinya terhadap manajemen pendidikan Islam modern.

### **Relevansi Pemikiran Ibn Khaldun terhadap Manajemen Pendidikan Islam Modern**

Pemikiran Ibn Khaldun memiliki relevansi yang luar biasa dalam konteks manajemen pendidikan Islam modern. Ia menawarkan kerangka filosofis yang mampu menjembatani antara nilai-nilai Islam klasik dan kebutuhan pendidikan kontemporer. Pada masa kini, lembaga pendidikan Islam dihadapkan pada tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, dan tuntutan kompetensi abad ke-21. Untuk menjawab tantangan tersebut, konsep

kepemimpinan Ibn Khaldun dapat dijadikan pedoman normatif sekaligus praktis.

Pertama, Ibn Khaldun menegaskan bahwa keberhasilan suatu lembaga pendidikan sangat bergantung pada kualitas pemimpinnya. Pemimpin pendidikan Islam ideal harus menjadi visionary leader yang berwawasan luas dan memiliki kepekaan moral. Dalam *Muqaddimah*, Ibn Khaldun menyebut bahwa peradaban hancur ketika pemimpin kehilangan integritas dan hanya berfokus pada kekuasaan. Pandangan ini senada dengan teori transformational leadership yang menekankan pentingnya visi, inspirasi, dan keteladanan dalam memimpin lembaga pendidikan (Rahman & Fauzi, 2021).

Kedua, konsep 'asabiyyah yang diperkenalkan Ibn Khaldun menjadi kunci dalam membangun solidaritas dan kerja sama di lingkungan pendidikan. Dalam konteks lembaga pendidikan modern, 'asabiyyah dapat diartikan sebagai semangat kolektif dan kolaboratif antara guru, siswa, dan tenaga kependidikan untuk mencapai visi bersama. Hal ini sejalan dengan teori collaborative leadership yang menempatkan kepemimpinan sebagai proses sosial, bukan monopoli individu (Zulkifli, Hasan, & Alawi, 2024).

Ketiga, Ibn Khaldun mengajarkan pentingnya keadilan (al-'adl) dalam kepemimpinan. Menurutnya, kezaliman adalah penyebab utama kehancuran institusi. Dalam konteks manajemen pendidikan Islam, keadilan dapat diterapkan dalam rekrutmen guru, penilaian kinerja, serta pembagian sumber daya lembaga. Al-Saidi (2023) menunjukkan bahwa etika dan keadilan pemimpin pendidikan Islam berpengaruh signifikan terhadap loyalitas dan kinerja guru. Dengan demikian, konsep keadilan Ibn Khaldun menjadi prinsip fundamental dalam tata kelola lembaga pendidikan Islam modern.

Keempat, relevansi pemikiran Ibn Khaldun juga tampak pada pandangannya terhadap proses pendidikan yang bertahap (tadarruj) dan berbasis konteks sosial. Ia menolak sistem pendidikan yang terlalu teoritis dan menekankan pentingnya pengalaman praktis (tajrībah) sebagai bagian dari pembelajaran. Dalam pendidikan modern, prinsip ini dapat diintegrasikan dalam pendekatan experiential learning yang menekankan pembelajaran melalui pengalaman langsung.

Kelima, Ibn Khaldun menolak dikotomi antara ilmu agama dan ilmu duniawi. Ia berpendapat bahwa semua ilmu memiliki nilai jika digunakan untuk kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam harus mengembangkan kurikulum yang holistik dan interdisipliner. Model ini sejalan dengan gagasan integrated curriculum yang menggabungkan ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai Islam (Nurhadi, 2023).

Keenam, dalam bidang manajemen mutu, pemikiran Ibn Khaldun selaras dengan prinsip *Total Quality Management* (TQM). Ia menekankan pentingnya konsistensi, evaluasi berkelanjutan, dan keterlibatan semua pihak dalam pengelolaan lembaga. Prinsip ini dapat diadaptasi melalui pendekatan *Islamic TQM*, yaitu sistem peningkatan mutu yang berlandaskan nilai-nilai spiritual seperti ihsan, amanah, dan syura (Zulfa & Halimatuzzahrah, 2025).

Ketujuh, Ibn Khaldun menempatkan pemimpin pendidikan sebagai figur moral yang harus menanamkan nilai-nilai spiritual dalam organisasi. Ia tidak hanya bertanggung jawab atas kebijakan, tetapi juga pembentukan karakter warga lembaga. Dalam konteks ini, teori spiritual leadership menjadi relevan karena menggabungkan motivasi intrinsik dengan tujuan transendental (Nurhadi, 2023). Pemimpin pendidikan Islam yang mengamalkan nilai spiritual mampu membangun budaya kerja yang penuh makna dan keikhlasan.

Terakhir, relevansi pemikiran Ibn Khaldun juga terletak pada pandangannya tentang keseimbangan antara stabilitas dan perubahan. Ia menyadari bahwa peradaban bersifat dinamis dan setiap generasi menghadapi tantangan baru. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam perlu melakukan inovasi yang berkesinambungan tanpa meninggalkan nilai dasarnya. Prinsip ini sesuai dengan konsep adaptive leadership, yaitu kemampuan pemimpin menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan tanpa kehilangan identitas (Zulkifli et al., 2024).

Dengan demikian, pemikiran Ibn Khaldun tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga aplikatif dalam membangun sistem manajemen pendidikan Islam yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada nilai.

### **Tantangan dan Implementasi Konsep Ibn Khaldun di Era Digital**

Implementasi konsep kepemimpinan Ibn Khaldun dalam pendidikan Islam era digital menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai spiritual. Perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan artificial intelligence mengubah cara belajar dan mengajar secara drastis. Namun, Ibn Khaldun telah mengingatkan bahwa kemajuan material tanpa pengendalian moral akan mengarah pada dekadensi peradaban (Ibnu Khaldun, 2011).

Pemimpin lembaga pendidikan Islam perlu memiliki kompetensi digital yang disertai literasi etika dan spiritual. Hal ini penting agar penggunaan teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat nilai Islam. Studi oleh Zulkifli et al. (2024) menunjukkan bahwa pemimpin yang mampu mengintegrasikan manajemen digital dengan nilai spiritual lebih berhasil menjaga jati diri lembaga pendidikan Islam.

Tantangan lainnya adalah kesiapan sumber daya manusia. Banyak lembaga pendidikan Islam belum memiliki tenaga pendidik yang mampu memanfaatkan teknologi secara optimal. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan (*continuous professional development*) dan budaya belajar sepanjang hayat menjadi kebutuhan mendesak. Prinsip tadarruj Ibn Khaldun dapat diterapkan dalam program peningkatan kapasitas guru agar mereka dapat berkembang secara bertahap sesuai kemampuan dan konteksnya.

Selain itu, struktur organisasi pendidikan Islam sering kali masih hierarkis dan kurang adaptif. Ibn Khaldun menekankan pentingnya '*asabiyah ilmiyyah*' atau solidaritas intelektual. Pemimpin perlu membangun budaya organisasi yang partisipatif, kolaboratif, dan terbuka terhadap inovasi. Dengan demikian, nilai-nilai Ibn Khaldun dapat diimplementasikan secara realistik dalam era digital tanpa kehilangan substansinya.

Perkembangan teknologi digital, globalisasi, dan disrupti informasi telah membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan Islam. Transformasi ini menciptakan peluang sekaligus tantangan baru dalam mengimplementasikan nilai-nilai kepemimpinan pendidikan yang digagas oleh Ibn Khaldun. Dalam konteks modern, lembaga pendidikan Islam tidak hanya berhadapan dengan masalah administratif atau kurikulum, tetapi juga harus mampu menavigasi arus informasi global yang cepat, penetrasi media sosial, serta integrasi kecerdasan buatan (AI) ke dalam sistem pembelajaran (Zulkifli, Hasan, & Alawi, 2024).

Ibn Khaldun sendiri dalam Muqaddimah menegaskan bahwa perubahan sosial dan kemajuan teknologi adalah keniscayaan yang akan selalu mempengaruhi struktur masyarakat. Ia memperingatkan bahwa peradaban akan melemah jika manusia terjebak pada kemewahan dan kehilangan kesadaran moral. Dalam konteks pendidikan masa kini, tantangan itu tampak dalam bentuk "digital decadence" ketika teknologi pendidikan digunakan secara mekanistik tanpa diimbangi dengan nilai spiritual dan etika. Karena itu, kepemimpinan pendidikan Islam harus mengambil peran sebagai pengendali moral terhadap penggunaan teknologi, bukan sekadar pengadopsi inovasi (Ibnu Khaldun, 2011).

Pemimpin lembaga pendidikan Islam masa kini dituntut memiliki digital literacy yang kuat, tetapi juga spiritual literacy yang mendalam. Kedua hal ini harus berjalan berdampingan. Literasi digital akan membantu mereka memahami dan memanfaatkan teknologi pembelajaran, sedangkan literasi spiritual akan menjaga agar penggunaan teknologi tetap selaras dengan nilai Islam. Penelitian oleh Nurhadi (2023) menunjukkan bahwa pemimpin yang

mampu menggabungkan dua kompetensi tersebut—digital dan spiritual—cenderung menghasilkan organisasi yang lebih adaptif dan bermakna.

Dalam konteks manajerial, implementasi konsep Ibn Khaldun dapat diterapkan melalui strategi integrasi teknologi yang berlandaskan nilai. Misalnya, penggunaan Learning Management System (LMS) atau sistem pembelajaran daring harus diarahkan untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran dan membangun budaya belajar yang etis. Pemimpin pendidikan Islam yang meneladani prinsip amanah dan ihsan akan memastikan bahwa digitalisasi pendidikan tidak menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi justru memperkuat dimensi spiritual dan sosial peserta didik.

Tantangan lain yang dihadapi adalah transformasi budaya organisasi. Banyak lembaga pendidikan Islam masih mengadopsi model birokratis dan hierarkis yang kurang adaptif terhadap perubahan digital. Ibn Khaldun mengajarkan pentingnya ‘asabiyyah ilmiyyah, yakni semangat solidaritas dan kolaborasi dalam membangun peradaban. Prinsip ini sangat relevan untuk membentuk budaya organisasi yang kolaboratif dan partisipatif. Pemimpin pendidikan Islam perlu mendorong partisipasi aktif guru, siswa, dan masyarakat dalam proses inovasi digital agar transformasi yang terjadi bukan hasil instruksi sepihak, tetapi hasil kerja kolektif (Rahim & Mahmud, 2021).

Di sisi lain, tantangan moral menjadi persoalan besar di era digital. Kemudahan akses terhadap informasi sering kali tidak diiringi dengan literasi etika. Banyak peserta didik terpapar konten negatif, hoaks, dan perilaku konsumtif digital. Di sinilah relevansi pemikiran Ibn Khaldun tentang tahdzib al-akhlaq (pembinaan akhlak) menjadi sangat penting. Kepemimpinan pendidikan Islam harus berperan aktif membangun regulasi moral yang jelas dan menanamkan nilai-nilai keislaman dalam penggunaan teknologi.

Lebih jauh, Ibn Khaldun menekankan pentingnya keseimbangan antara pengalaman empiris dan pengetahuan teoritis. Dalam konteks digital, hal ini dapat diwujudkan melalui model pembelajaran blended learning, yang menggabungkan interaksi daring dengan pembinaan langsung (face-to-face mentoring). Model ini tidak hanya meningkatkan fleksibilitas belajar, tetapi juga menjaga dimensi kemanusiaan dan spiritual dalam proses pendidikan (Zulkifli et al., 2024).

Selain aspek teknis, kepemimpinan Ibn Khaldun juga relevan dalam konteks kebijakan publik pendidikan Islam. Pemerintah dan lembaga Islam perlu menegakkan prinsip al-‘adl (keadilan) dalam distribusi sumber daya digital, memastikan semua siswa memiliki akses terhadap teknologi yang sama. Dalam hal ini, prinsip keadilan Ibn Khaldun menjadi pijakan moral untuk

menolak ketimpangan digital (digital divide) yang dapat menciptakan kesenjangan sosial di dunia pendidikan.

Secara keseluruhan, implementasi konsep Ibn Khaldun di era digital menuntut kepemimpinan yang visioner, etis, dan adaptif. Pemimpin pendidikan Islam harus menjadi bridge leader jembatan antara tradisi dan inovasi, antara spiritualitas dan modernitas. Seperti yang ditegaskan Zulkifli et al. (2024), masa depan lembaga pendidikan Islam akan ditentukan oleh sejauh mana ia mampu mengadopsi teknologi tanpa kehilangan nilai, serta berinovasi tanpa meninggalkan spiritualitas. Dengan demikian, kepemimpinan Ibn Khaldun menjadi panduan moral dan manajerial yang sangat relevan bagi pendidikan Islam di abad ke-21.

### **Implikasi Kepemimpinan Pendidikan Islam Berbasis Nilai**

Sintesis dari keseluruhan pemikiran Ibn Khaldun menunjukkan bahwa kepemimpinan pendidikan Islam adalah proses integratif antara ilmu, moralitas, dan manajemen. Kepemimpinan bukan sekadar alat administratif, tetapi juga mekanisme spiritual yang membentuk manusia dan peradaban.

Implikasinya bagi manajemen pendidikan Islam modern meliputi beberapa hal. Pertama, perlu dikembangkan sistem value-based management, di mana keputusan dan kebijakan lembaga berpijak pada nilai Islam seperti amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Kedua, penerapan kepemimpinan transformatif berbasis spiritualitas perlu diperkuat agar guru dan siswa termotivasi secara intrinsik. Ketiga, digitalisasi pendidikan harus diimbangi dengan penguatan akhlak dan etika. Ibn Khaldun mengingatkan bahwa keberhasilan peradaban bergantung pada keselarasan antara ilmu dan nilai. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam perlu menjadikan kepemimpinan berbasis nilai sebagai fondasi utama agar mampu menciptakan masyarakat beradab, produktif, dan beriman.

Model kepemimpinan Ibn Khaldun bersifat transformatif karena berorientasi pada perubahan moral dan intelektual individu. Ia menolak kepemimpinan yang bersifat status quo dan menyerukan pemimpin untuk berperan sebagai agen perubahan (agent of civilization). Dalam konteks modern, hal ini berarti pemimpin lembaga pendidikan Islam harus mampu memotivasi seluruh elemen lembaga untuk terus belajar, berinovasi, dan berkontribusi dalam membangun masyarakat beradab.

Implikasi praktis dari konsep ini dapat dijabarkan dalam tiga ranah utama. Pertama, pada tataran manajerial, pemimpin pendidikan harus membangun sistem value-based management, di mana keputusan strategis berlandaskan nilai-nilai Islam seperti amanah, keadilan, dan tanggung jawab.

Sistem ini memastikan bahwa setiap kebijakan tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga bermakna secara moral.

Kedua, pada ranah kultural, kepemimpinan pendidikan Islam harus membangun budaya organisasi yang kolaboratif dan etis. Konsep ‘asabiyyah ilmiyyah dapat dijadikan dasar dalam menumbuhkan semangat kebersamaan di antara guru, staf, dan peserta didik. Budaya organisasi semacam ini akan menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif terhadap mutu dan spiritualitas lembaga.

Ketiga, pada ranah spiritual, pemimpin harus menjadi teladan moral (uswah hasanah) yang mencerminkan nilai Islam dalam tindakan sehari-hari. Seperti ditegaskan dalam penelitian oleh Nurhadi (2023), kepemimpinan spiritual yang berlandaskan nilai-nilai keislaman memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas, motivasi, dan keefektifan organisasi.

Kepemimpinan pendidikan Islam berbasis nilai juga memiliki implikasi strategis terhadap pembangunan bangsa. Dalam jangka panjang, lembaga pendidikan yang dipimpin berdasarkan nilai-nilai Ibn Khaldun akan mampu melahirkan generasi pemimpin baru yang berilmu, berkarakter, dan memiliki kesadaran sosial tinggi. Generasi inilah yang akan melanjutkan cita-cita ‘umran Ibn Khaldun: membangun peradaban yang adil, berpengetahuan, dan berakhhlak.

Dengan demikian, sintesis pemikiran Ibn Khaldun memberikan arah yang jelas bagi pengembangan manajemen pendidikan Islam masa kini. Ia tidak hanya berbicara tentang teori, tetapi juga memberikan prinsip-prinsip operasional yang dapat diadaptasi untuk menjawab tantangan modernitas. Jika diimplementasikan dengan konsisten, konsep kepemimpinan Ibn Khaldun dapat menjadi paradigma baru yang menggabungkan spiritual wisdom dan managerial intelligence dua elemen yang kini sangat dibutuhkan dalam sistem pendidikan Islam global.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian mendalam terhadap pemikiran Ibn Khaldun dan relevansinya dalam konteks pendidikan Islam modern, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan pendidikan yang ideal menurut Ibn Khaldun adalah kepemimpinan yang menyeimbangkan antara dimensi moral, intelektual, spiritual, dan sosial. Pendidikan, dalam pandangan Ibn Khaldun, merupakan sarana pembentukan manusia beradab (*insān al-madani*), sedangkan kepemimpinan adalah instrumen pengarah yang menentukan arah perkembangan masyarakat dan peradaban. Konsep kepemimpinan Ibn Khaldun yang menekankan ilmu, keadilan, dan tanggung jawab sosial memiliki

kesesuaian dengan prinsip manajemen pendidikan Islam masa kini. Dalam praktik manajemen modern, gagasannya dapat diidentifikasi dalam pendekatan transformational leadership (kepemimpinan visioner dan inspiratif), spiritual leadership (kepemimpinan berbasis nilai), serta Total Quality Management (manajemen mutu berkelanjutan). Prinsip 'asabiyyah ilmiyyah (solidaritas ilmiah) menegaskan pentingnya kolaborasi, partisipasi, dan rasa tanggung jawab bersama dalam membangun lembaga pendidikan Islam yang unggul. Tantangan utama dalam penerapan konsep Ibn Khaldun di era modern adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan nilai moral. Lembaga pendidikan Islam perlu memastikan bahwa digitalisasi pembelajaran tidak menghilangkan esensi ta'dib (pembinaan akhlak), melainkan menjadi sarana untuk memperkuat karakter dan keilmuan peserta didik. Dengan demikian, pemikiran Ibn Khaldun tetap relevan sebagai model konseptual dan praktis bagi pengembangan manajemen pendidikan Islam modern. Ia menawarkan paradigma kepemimpinan yang menyatukan rasionalitas, spiritualitas, dan moralitas sebagai fondasi utama. Apabila nilai-nilai ini diimplementasikan secara konsisten, lembaga pendidikan Islam tidak hanya akan mampu bersaing di tengah arus globalisasi dan digitalisasi, tetapi juga berkontribusi nyata dalam membangun peradaban yang berkeadilan, berpengetahuan, dan berakhlak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata. (2018). Manajemen pendidikan Islam. Jakarta: Kencana.
- Al-Saidi, M. (2023). Ethical leadership and justice in Islamic educational management. *International Journal of Educational Ethics*, 4(1), 33–48.
- Fransisca, V. D. (2023). Mengintegrasikan sistem teknologi dalam manajemen sarana dan prasarana untuk pendidikan yang lebih modern. *Proceedings Series of Educational Studies*.
- Ibnu Khaldun. (2011). *Muqaddimah Ibnu Khaldun* (Terj. Masturi Irham dkk.). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Indra Kurniawan. (2022). Manajemen pendidikan Islam dalam perspektif pemikiran Ibnu Khaldun. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 145–147.
- Muh. Sya'rani. (2020). Konsep pendidikan dalam pemikiran Ibnu Khaldun. Yogyakarta: Deepublish.
- Nurhadi, M. (2023). Spiritual leadership and organizational effectiveness in Islamic schools: Integrating ethics and management. *International Journal of Islamic Educational Management*, 8(1), 55–68.

- Rahim, H., & Mahmud, A. (2021). Organizational culture and value-based leadership in Islamic education institutions. *Asian Journal of Islamic Management*, 6(2), 119–134.
- Rahman, A., & Fauzi, M. (2021). Transformational leadership in Islamic education institutions: Values and practices. *Journal of Islamic Education Studies*, 5(3), 201–215.
- Zulfa, E. & Halimatuzzahrah. (2025). Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Penerapan Total Quality Management di Lembaga Pendidikan Islam. *At-Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1).
- Zulkifli, H., Hasan, N., & Alawi, R. (2024). Digital transformation and Islamic leadership: Managing education in the era of disruption. *Al-Tarbiyah: Journal of Islamic Education*, 9(1), 32–49.
- Book:**
- Rifa'i, M., & Fadhli, M. (2013). *Manajemen organisasi* (C. Wijaya (ed.)). Medan: Citapustaka Media Perintis.